



PRIORITAS PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN *SMART GOVERNMENT*

Rizky Arif Nugroho¹, Andi Atikah Melinda Septiana²

¹⁾²⁾ Institut Teknologi Kalimantan

Email: arif.rizky@lecturer.itk.ac.id

Abstrak

Kota Samarinda akan diarahkan menjadi Kota Samarinda yang berkelanjutan dengan pondasi *smart city* berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda 2005-2025. Hal ini didukung oleh terpilihnya Kota Samarinda dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia. Kota Samarinda menyusun masterplan Samarinda *smart city* Tahun 2017-2025 sebagai tindak lanjut program tersebut, sehingga perlu diketahui aspek prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan *smart government*. Dalam menganalisis faktor prioritas yang perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung *smart city* digunakan metode analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Berdasarkan perhitungan analisis *Analytical Hierarchy Process* dari jawaban masing-masing responden yang menjadi sampel, diperoleh hasil variabel prioritas untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung *smart city* adalah melalui reformasi peraturan.

Kata Kunci: AHP, Kapasitas, Pemerintah Daerah, Prioritas

Abstract

Samarinda City will be directed toward sustainability based on smart city concept as stated on Samarinda City Long Term Planning Document 2005-2025. The planning concept was deployed as Samarinda City appointed as representative on Movement Toward 100 Smart Cities in Indonesia. Therefore, Samarinda City compiled Samarinda Smart City Masterplan to follow up the program. As a follow up regarding the plan, priority aspect for upgrading local government capacity in order to support Smart Government component needs to be acknowledged. By the purpose of analyzing the priority aspect, this research utilized Analytical Hierarchy Process method. Based on Analytical Hierarchy Process analysis conducted to each sampled respondent answer, policy reformation was the priority aspect.

Keywords : AHP, Capacity, Local Government, Priority

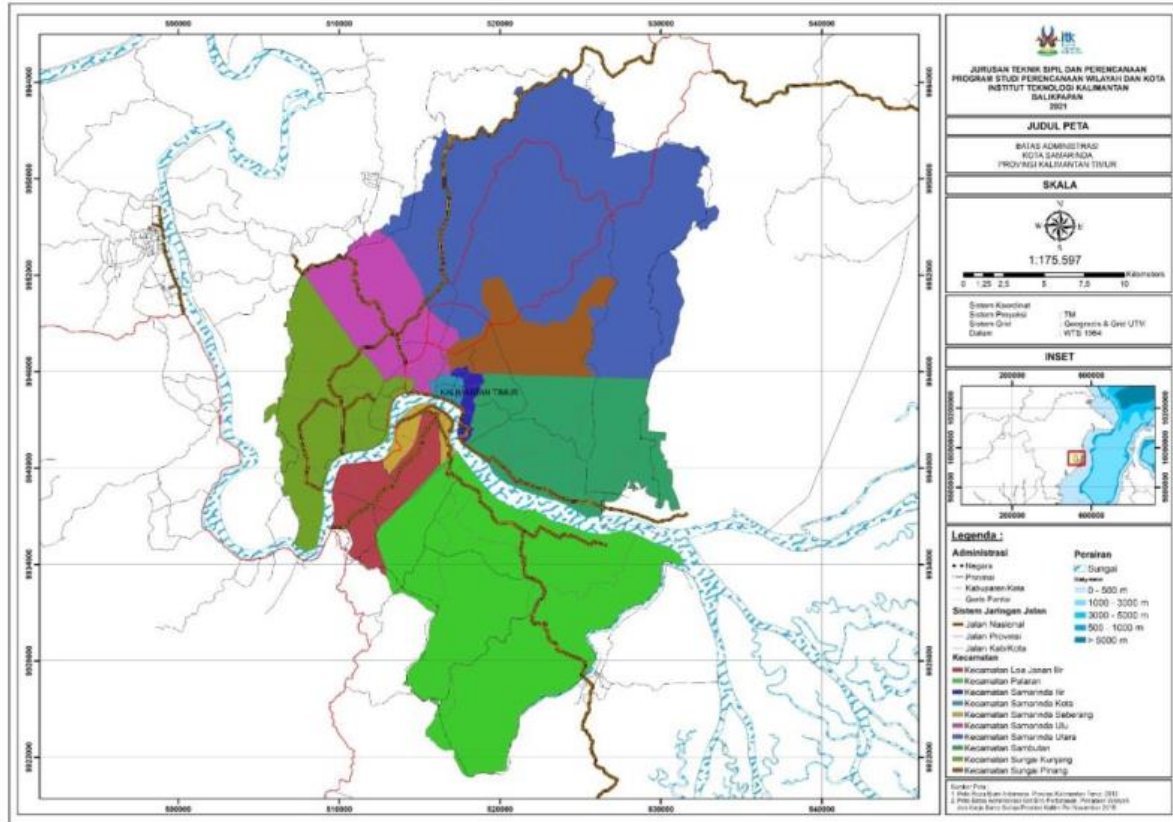
1. PENDAHULUAN

Kota Samarinda, sebagai Ibu Kota Provinsi, memiliki kedudukan yang strategis dalam berbagai kegiatan seperti industri, perdagangan dan jasa serta permukiman berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Kota

Samarinda akan diarahkan menjadi Kota Samarinda yang berkelanjutan dengan pondasi *smart city* berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda 2005-2025. Hal ini didukung oleh terpilihnya Kota Samarinda dalam program Gerakan Menuju 100 *Smart City* di Indonesia. Kota Samarinda menyusun *masterplan* Samarinda *Smart City* Tahun 2017-2025 sebagai tindak lanjut

program tersebut. Dalam dokumen itu terdapat muatan terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi yang dapat diwujudkan melalui penerapan dimensi *Smart Government*. Oleh karena itu, maka perlu diketahui aspek prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas

pemerintah daerah dalam mewujudkan *smart government*. Dalam mengidentifikasi faktor prioritas tersebut, maka diperlukan penilaian terhadap sektor pemerintahan di Kota Samarinda. Dengan demikian maka, penelitian ini memilih lokus penelitian di Kota Samarinda, berikut peta lokasinya.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, 2013
Gambar 1 Lokus Penelitian

Sehingga dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui faktor apa yang menjadi prioritas dalam

peningkatan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat mewujudkan *smart government*.

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep *Smart City* merupakan kota dengan konsep pengembangan yang memanfaatkan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara pintar dan efisien dalam penggunaan sumber daya (Boyd Cohen, 2014). Terdapat enam komponen dalam *smart city* yaitu *smart economy*, *smart mobility*, *smart government*, *smart people*, *smart living* dan *smart environment* (I. P. A. E. Pratama 2014). *Smart government* merupakan aspek ujung tombak perencanaan *smart city* (Annisah, 2018). Tanpa adanya perencanaan

smart government maka mustahil untuk mewujudkan seluruh konsep *smart city*. Berdasarkan *Masterplan Jakarta Smart City*, aspek penting *smart government* adalah penggunaan TIK untuk pelayanan pemerintahan, mewujudkan keterbukaan dan transparansi data, serta merumuskan kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Jakarta Smart City, 2017).

Prinsip dasar *smart government* dalam penerapan *smart city* adalah sebagai berikut (Bappenas, 2015):

1. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mengkolaborasikan, dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan efisiensi dengan mengembangkan operasional.
3. Meningkatkan manajemen sumber daya, organisasi, dan infrastruktur.
4. Menciptakan sistem *database* yang mampu diakses secara luas.
5. Mengolah informasi data terkini (*real time*).
6. Menggunakan metode yang mutakhir.
7. Terdapat koordinasi antar *stakeholders* yang terlibat.

Perwujudan *smart government* juga dapat dilihat pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelayanan umum dan sosial, serta pemerintahan yang transparan (R. Giffinger et al., 2007). Selain itu, mewujudkan dimensi *smart government* tidak hanya sebatas menyediakan perangkat komputer dan jaringan internet untuk pemerintah namun ada hal yang perlu diperhatikan, yakni (Subekti and Gustomy, 2018):

1. *Publish*
Pemerintah wajib membuka arus informasi kepada masyarakat.
2. *Interact*
Pemerintah memberikan kesempatan berpartisipasi kepada masyarakat.
3. *Transact*
Pemerintah dapat memberikan pelayanan secara daring kepada masyarakat.

Dalam peningkatan kapasitas, terdapat faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi peningkatan kapasitas (Soeprapto 2003):

1. Komitmen bersama
Pengaruh komitmen sangat besar dalam peningkatan kapasitas karena hal ini merupakan dasar dari seluruh kegiatan yang akan dicapai.
2. Kepemimpinan yang kondusif
Kepemimpinan kondusif merupakan kepemimpinan yang dinamis serta memberikan kesempatan pengembangan kapasitas untuk seluruh elemen organisasi.
3. Reformasi peraturan
Reformasi peraturan bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah

profesional yang berkarakteristik, berintegrasi, serta berkinerja tinggi.

4. Peningkatan kekuatan dan kelemahan
Seluruh elemen organisasi harus dapat memahami dan menjelaskan kekuatan serta kelemahan organisasi tersebut.

Kapasitas merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, dan menunjukkan permasalahan, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, dan mengumpulkan pengetahuan untuk masa yang akan datang Alaerts dalam (Leidel, Niemann, and Hagemann, 2012). Pengembangan kapasitas berarti sejauh mana seorang personalia mampu menunjukkan kontribusi nyata bagi pengembangan personel, organisasi, dan masyarakat (Dwihastari and Marom, 2017). Menurut T. Yuwono (2003), terdapat persyaratan peningkatan kapasitas pemerintah yaitu partisipasi, inovasi, akses informasi, akuntabilitas dan kepemimpinan. Inovasi penting sebab dengan inovasi maka akan tersedia alternatif dan variasi dalam metode pembangunan (Ulum, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari, Makmur, and Ribawanto, 2013) yang berjudul Pengembangan Kapasitas (*capacity building*) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, diperoleh hasil bahwa faktor pendukung pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi kepemimpinan dan komitmen bersama. Adapun faktor penghambat pengembangan kapasitas yaitu inkonsistensi peraturan, terdapat peraturan yang sering berubah sehingga kesulitan dalam menyelesaikan tugas pokok. Sedangkan dalam penelitian ini, hanya mengkaji aspek prioritas untuk dikembangkan dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung konsep *smart city*.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dibahas sebelumnya, maka variabel yang digunakan untuk mengukur faktor prioritas yang harus ditingkatkan guna mendukung *smart government* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat
2. Keterbukaan data
3. Implementasi kebijakan
4. Kualitas pelayanan publik
5. Pemanfaatan TIK

6. Kepemimpinan
7. Reformasi peraturan
8. Inovasi

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendapat (Creswell and Creswell, 2018), populasi merupakan sekelompok individu yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk diidentifikasi dan dipelajari, kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kota Samarinda. Populasi menjadi dasar pengambilan sampel dimana sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. (Arikunto, 2011) Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri yang berjudul Arah Kebijakan Pengembangan Kota Cerdas (Smart City) Sebagai Upaya Mendorong Transformasi Digital Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Bappeda Kota Samarinda
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
3. Dinas Pertanahan Kota Samarinda
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
7. Dinas Perpustakaan Kota Samarinda
8. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kuesioner dimana kuesioner adalah sebuah metode pengumpulan data melalui serangkaian pertanyaan yang diberikan pada responden (Sugiyono, 2015).

Adapun dalam menganalisis faktor prioritas yang perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung *smart city* digunakan metode analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Menurut (Marimin, 2004), dari berbagai variabel yang diukur, dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel dengan prioritas tinggi dan berperan mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. Prinsip metode analisis (AHP) adalah penyederhanaan persoalan kompleks yang tidak terstruktur menjadi hierarki. Secara umum metode AHP diawali dengan menyusun struktur permasalahan, lalu dibandingkan antar dua variabel, dilakukan evaluasi, dan menentukan alternatif terbaik (Saaty dalam (I. Z. Nasibu, 2009). Skala pembobotan pada analisis AHP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Skala Preferensi Perbandingan Berpasangan

Nilai	Keterangan	Penjelasan
1	Variabel A sama pentingnya dengan Variabel B	Kedua variabel memiliki pengaruh yang sama besar terhadap peningkatan kapasitas
3	Variabel A sedikit lebih penting daripada Variabel B	Satu variabel memiliki sedikit pengaruh terhadap peningkatan kapasitas dibanding variabel lainnya
5	Variabel A cukup penting daripada Variabel B	Satu variabel memiliki pengaruh terhadap peningkatan kapasitas dibandingkan variabel lainnya
7	Variabel A sangat penting daripada Variabel B	Satu variabel memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kapasitas dibandingkan variabel lainnya
9	Variabel A mutlak penting daripada Variabel B (kepentingan lebih ekstrim)	Satu variabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan kapasitas dibandingkan variabel lainnya
2, 4, 6, 8	Ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan	Nilai ini diberikan jika ragu-ragu diantara dua pilihan

Sumber: Saaty dalam Marimin (2004)

Adapun tahap *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah:

1. Menentukan tujuan yang akan dicapai

2. Mengumpulkan variabel-variabel yang berpengaruh
3. Mengumpulkan penilaian responden

4. Membuat matriks perbandingan berpasangan
5. Menggabungkan penilaian seluruh responden
Berikut persamaan yang digunakan dalam proses penggabungan hasil seluruh responden:
Hasil Penggabungan =
$$\sqrt[n]{(Res\ 1) \times (Res\ 2) \times (Res\ \dots)}$$
6. Normalisasi hasil penggabungan
Berikut persamaan untuk mendapatkan nilai normalisasi:
Nilai Normalisasi =
$$\frac{(\text{Nilai salah satu variabel pasangan})}{\text{Jumlah nilai pada satu kolom yang sama}}$$
7. Menghitung nilai *priority vector*
Berikut persamaan untuk mendapatkan nilai *Priority Vector*:
Priority Vector =
$$\frac{\text{Jumlah nilai normalisasi dalam satu baris}}{\text{Banyaknya variabel}}$$
8. Menghitung nilai konsistensi
 - a. Menghitung *eigen value*
Berikut contoh perhitungan *eigen value*:
Eigen Value =
$$(\text{Total jumlah nilai kolom ke 1} \times \text{Nilai priority vector ke 1}) + (\text{Total jumlah nilai kolom ke 2} \times \text{Nilai priority vector ke 2}) + (\text{Total jumlah nilai kolom ke n} \times \text{Nilai priority vector ke n})$$
 - b. Menghitung nilai *consistency index* (CI)
Berikut persamaan dalam mendapatkan nilai *Consistency Index* (CI):
$$CI = \frac{\text{eigen value} - \text{jumlah variabel}}{\text{jumlah variabel} - 1}$$
 - c. Menghitung nilai *consistency ratio* (CR)
Adapun persamaan dalam perhitungan Nilai CR adalah:
$$CR = \frac{CI}{RI} \leq 0.1$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun dalam tahap analisis ini terdapat beberapa pihak yang menjadi responden (R) dalam penelitian ini, diantaranya adalah Bappeda Kota Samarinda (R1), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda (R2), Dinas Pertanahan Kota Samarinda (R3), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda (R4), Dinas Perpustakaan Kota Samarinda (R5), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda (R6), BP Kota Samarinda (R7), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Samarinda (R8). Berikut merupakan tabel penilaian responden terhadap variabel penelitian.

Tabel 2. Penilaian Responden

Variabel	Responden Penelitian								Variabel
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
Partisipasi masyarakat	5.00	0.33	1.00	7.00	7.00	0.33	0.14	1.00	Keterbukaan data
Partisipasi masyarakat	0.14	0.33	0.14	1.00	7.00	0.33	0.20	1.00	Implementasi kebijakan
Partisipasi masyarakat	0.11	0.14	7.00	1.00	5.00	0.14	0.14	0.33	Kualitas pelayanan publik
Partisipasi masyarakat	7.00	0.20	0.13	3.00	3.00	0.20	0.14	0.11	Kepemimpinan
Partisipasi masyarakat	7.00	0.33	0.14	7.00	7.00	0.33	4.00	0.14	Reformasi peraturan

Partisipasi masyarakat	1.00	0.14	0.17	3.00	0.33	0.20	0.20	0.14	Inovasi
Partisipasi masyarakat	3.00	0.14	1.00	1.00	3.00	0.14	0.33	0.14	Pemanfaatan TIK
Keterbukaan data	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	5.00	5.00	0.33	Implementasi kebijakan
Keterbukaan data	0.20	1.00	7.00	1.00	0.33	0.20	4.00	1.00	Kualitas pelayanan publik
Keterbukaan data	5.00	0.33	0.13	3.00	0.20	0.20	5.00	0.33	Kepemimpinan
Keterbukaan data	5.00	0.33	0.14	1.00	3.00	0.33	7.00	2.00	Reformasi peraturan
Keterbukaan data	1.00	0.14	0.17	5.00	0.14	0.20	7.00	0.14	Inovasi
Keterbukaan data	3.00	0.14	3.00	1.00	0.14	0.20	5.00	0.33	Pemanfaatan TIK
Implementasi kebijakan	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.14	1.00	1.00	Kualitas pelayanan publik
Implementasi kebijakan	5.00	0.33	3.00	3.00	0.33	0.33	5.00	0.33	Kepemimpinan
Implementasi kebijakan	7.00	1.00	5.00	7.00	0.33	0.33	5.00	3.00	Reformasi peraturan
Implementasi kebijakan	1.00	0.20	1.00	1.00	0.20	0.20	0.20	3.00	Inovasi
Implementasi kebijakan	3.00	0.20	5.00	1.00	0.14	0.14	7.00	0.33	Pemanfaatan TIK
Kualitas pelayanan publik	5.00	3.00	0.13	1.00	0.33	5.00	2.00	0.14	Kepemimpinan
Kualitas pelayanan publik	5.00	3.00	0.14	3.00	3.00	5.00	5.00	0.33	Reformasi peraturan
Kualitas pelayanan publik	1.00	1.00	7.00	7.00	0.20	1.00	5.00	0.14	Inovasi
Kualitas pelayanan publik	3.00	1.00	5.00	1.00	0.33	5.00	5.00	0.33	Pemanfaatan TIK
Kepemimpinan	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	5.00	5.00	3.00	Reformasi peraturan
Kepemimpinan	0.33	0.20	0.14	1.00	0.33	3.00	5.00	3.00	Inovasi
Kepemimpinan	0.33	0.20	8.00	1.00	3.00	3.00	4.00	3.00	Pemanfaatan TIK
Reformasi peraturan	0.33	0.33	0.14	3.00	0.33	0.33	0.33	3.00	Inovasi

Reformasi peraturan	0.20	0.20	0.14	5.00	0.20	0.33	1.00	3.00	Pemanfaatan TIK
Inovasi	1.00	1.00	8.00	7.00	1.00	1.00	2.00	5.00	Pemanfaatan TIK

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Kemudian dilakukan perhitungan lanjutan sebelum memperoleh hasil prioritas variabel. Pertama dihitung nilai penggabungan seluruh responden dengan menggunakan data pada

baris pertama pada Tabel 2 dan diperoleh hasil **1.18**. Hasil seluruh perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Matriks Perbandingan Berpasangan

Variabel	Partisipasi Masyarakat	Keterbukaan Data	Implementasi Kebijakan	Kualitas Pelayanan	Kepemimpinan	Reformasi Peraturan	Inovasi	Pemanfaatan TIK
Partisipasi Masyarakat	1.00	1.18	0.48	0.49	0.51	1.14	0.33	0.55
Keterbukaan Data	1.18	1.00	2.25	0.88	0.67	1.16	0.49	0.70
Implementasi Kebijakan	0.48	2.25	1.00	0.90	1.13	2.11	0.56	0.81
Kualitas Pelayanan	0.49	0.88	0.90	1.00	0.99	1.88	1.27	1.59
Kepemimpinan	0.51	0.67	1.13	0.99	1.00	2.59	0.78	1.66
Reformasi Peraturan	1.14	1.16	2.11	1.88	2.59	1.00	0.51	0.52
Inovasi	0.33	0.49	0.56	1.27	0.78	0.51	1.00	2.21
Pemanfaatan TIK	0.55	0.7	0.81	1.59	1.66	0.52	2.21	1.00
Jumlah	5.68	8.33	9.25	9.00	9.33	10.92	7.16	9.04

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Selanjutnya dilakukan normalisasi hasil penggabungan, contohnya menggunakan variabel Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Data. Perhitungan nilai normalisasi ini dilakukan dengan membagi nilai salah satu variabel dengan jumlah nilai pada satu kolom yang sama dengan hasil **0.14**.

Tujuan normalisasi adalah untuk mengetahui proporsi suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam kolom yang sama. Pada tahap ini nilai setiap kolom jika dijumlahkan adalah **1.00**. Seluruh hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4. Berikut ini.

Tabel 4. Normalisasi Hasil Penggabungan Penilaian Responden

Variabel	Partisipasi Masyarakat	Keterbukaan Data	Implementasi Kebijakan	Kualitas Pelayanan	Kepemimpinan	Reformasi Peraturan	Inovasi	Pemanfaatan TIK	Jumlah
Partisipasi Masyarakat	0.18	0.14	0.05	0.05	0.06	0.10	0.05	0.06	0.69
Keterbukaan Data	0.21	0.12	0.24	0.10	0.07	0.11	0.07	0.08	0.99
Implementasi Kebijakan	0.08	0.27	0.11	0.10	0.12	0.19	0.08	0.09	1.05
Kualitas Pelayanan	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.17	0.18	0.18	1.03
Kepemimpinan	0.09	0.08	0.12	0.11	0.11	0.24	0.11	0.18	1.04
Reformasi Peraturan	0.20	0.14	0.23	0.21	0.28	0.09	0.07	0.06	1.28

Inovasi	0.06	0.06	0.06	0.14	0.08	0.05	0.14	0.24	0.83
Pemanfaatan TIK	0.10	0.08	0.09	0.18	0.18	0.05	0.31	0.11	1.09
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Setelah itu dilakukan perhitungan nilai *priority vector* untuk mengetahui bobot setiap variabel dimana perhitungan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dalam satu baris yang sama dan diperoleh hasil sebesar **0.0864**

untuk variabel Partisipasi Masyarakat. Selanjutnya hasil perhitungan untuk baris yang lain serta pengurutan variabel berdasarkan prioritasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Urutan Variabel Berdasarkan Prioritasnya

Variabel	Priority Vector	Peringkat
Reformasi Peraturan	0.1595	1
Pemanfaatan TIK	0.1363	2
Implementasi kebijakan	0.1308	3
Kepemimpinan	0.1299	4
Kualitas pelayanan publik	0.1290	5
Keterbukaan data	0.1242	6
Inovasi	0.1041	7
Partisipasi masyarakat	0.0864	8

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tahap selanjutnya adalah menghitung nilai konsistensi yang terdiri atas perhitungan *eigen value* dengan hasil **8.83**, kemudian menghitung nilai *consistency index* dan diperoleh hasil sebesar **0.12**, dan terakhir menghitung nilai *consistency ratio* dengan hasil **0.09**. Hasil nilai *consistency ratio* diperoleh masih berada dalam jangkauan ≤ 0.1 yang artinya adalah hasilnya konsisten.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan analisis *Analytical Hierarchy Process* dari jawaban masing-masing responden yang menjadi sampel, diperoleh hasil variabel prioritas untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung *smart city* adalah melalui reformasi peraturan. Reformasi peraturan yang dapat dilakukan misalnya melalui penerapan *reward and punishment* di kalangan pegawai pemerintah daerah sehingga dapat memacu kualitas kinerjanya. Dengan demikian maka peningkatan kapasitas pemerintah daerah dapat terwujud.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih diucapkan sebesar-besarnya atas kerjasama yang telah diberikan oleh dinas-dinas pemerintah di Kota Balikpapan guna menyelesaikan penelitian ini.

7. REFERENSI

- Annisah, Annisah. (2018). "Usulan Perencanaan Smart City: Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko*." *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 8(1):59. doi: 10.17933/mti.v8i1.103.
- Arikunto, Suharsimi. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*. 6th ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas. (2015). "Konsep Pengembangan Kota Cerdas Yang Berdaya Saing."
- Boyd Cohen. (2014). "Smart City Index Master Indicators Survey."
- Creswell, John W., and J. David Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative,*

- Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth edition. Los Angeles: SAGE.
- Dwihastari, S., and A. Marom. (2017). "Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 6(2):215–25.
- I. P. A. E. Pratama. (2014). *Smart City Beserta Cloud Computing Dan Teknologi-Teknologi Pendukung*. Bandung: Informatika.
- I. Z. Nasibu. (2009). "Penerapan Metode AHP Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penempatan Karyawan Aplikasi Expect Choice." *Jurnal Pelangi Ilmu* 2(5):110–89.
- Jakarta Smart City. (2017). "Sistem Pendukung Indikator Smart Governance Di Jakarta Smart City."
- Leidel, M., S. Niemann, and N. Hagemann. (2012). "Capacity Development as a Key Factor for Integrated Water Resources Management (IWRM): Improving Water Management in the Western Bug River Basin, Ukraine." *Environmental Earth Sciences* 65(5):1415–26. doi: 10.1007/s12665-011-1223-5.
- Marimin. (2004). *Teknik Dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Grasindo.
- R. Giffinger, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanović, and E. Meijers. (2007). *Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities*. Vienna, Austria: Vienna University of Technology.
- Ratnasari, Jenivia Dwi, Mochamad Makmur, and Heru Ribawanto. (2013). "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang." *Jurnal Administrasi Publik* 1(3):103–10.
- Soeprapto, R. (2003). "Capacity Building of Local Government Towards Good Governance." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya* (4).
- Subekti, Tia, and Rachmad Gustomy. (2018). "Menguji Sistem E-Government Kota Malang Menuju Smart City." *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, Chazienul. (2018). "Manajemen E-Government Dalam Rangka Capacity Building Birokrasi Di Indonesia." *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)* 2(2):167. doi: 10.26740/bisma.v2n2.p167-172.
- Yuwono, Teguh. (2003). "Capacity Building in the Local Government: Concept and Analysis." Yogyakarta.